

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Arba, H.M.. *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Arto, Mukti. *Mencari Keadilan, Kritik, dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Gunanegara. *Rakyat dan Negara Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*. Jakarta : Tata Nusa, 2008.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Jambatan, 2009.
- \_\_\_\_\_. *Sengketa-Sengketa Tanah serta Penanggulangannya*. Jakarta: Jambatan, 2005.
- Hadrian, Endang. *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian pada Sistem Peradilan Perdata sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan di Indonesia*. Depok: Rajawali Press, 2022.
- Lorens, Bagus. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2009.
- Murad, Rusmadi. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung: Alumni, 1999.
- Pranjoto, Eddy. *Antinomi Norma Hukum Pembatalan Pemberian Hak Atas Tanah Oleh Peradilan Tata Usaha Negara dan Badan Pertanahan Nasional*. Bandung: CV Utomo, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Soemitro, Ronny Hanijito. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Sumardjono, Maria. *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2008.
- Sutedi, Adrian. *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Taufani, Galang., dan Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.

Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.

## **B. Artikel Jurnal**

Santoso, Urip. (2016). "Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum." *Perspektif*, Vol. XXI No. 3. <https://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/588>

Koeswahyono, Imam. (2008). "Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Pembangunan Bagi Umum", *Jurnal Konstitusi*, Vol 1 No. 1. <https://karyatulishukum.wordpress.com/about/melacak-dasar-konstitusional-pengadaan-tanah-untuk-kepentingan-pembangunan-bagi-umum/>

Rahmadani, Putri. (2022). "Penyelesaian sengketa ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Section Binjai-Pangkalan Brandan berbasis perlindungan hukum." *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 1 Issue 2. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/view/68>

Harefa, Safaruddin. (2022). "Penyelesaian Sengketa Tanah Dalam Pengadaan Proyek Jalan Tol Dengan Asas Keadilan." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* Vol 2 No. 1. <https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/view/154>

Hassan, Hasbi dan Wachid Abdurrahman. (2018). "Manajemen Konflik Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Batang–Semarang." *Journal of Politic and Government Studies* Vol 8. No. 1. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/22630>

Yacaranda, Lutfi. (2024). "Permasalahan dan Solusi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Jalan Tol Jalur Yogyakarta-Bawen (Studi di Kelurahan Sriwedari dan Kelurahan Keji Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang)." *Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*. <https://repository.stpn.ac.id/4114/>

Prastyasti, Hanifah. (2024). "Pelaksanaan Dan Problematika Dalam Inventarisasi Dan Identifikasi Objek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta Bawen II Di Kabupaten Temanggung." *Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*. <https://repository.stpn.ac.id/4075/>

## **C. Lain-lain**

Surat Pemberitahuan Nomor 590/0009895 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Provinsi Jawa Tengah. Diakses dari

<https://jatengprov.go.id/wpcontent/uploads/2021/07/pengumuman-tol-yogya-Bawen.pdf> pada 24 Oktober 2024

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/14 Tahun 2022 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen di Kabupaten Semarang. Diakses dari [https://jdih.jatengprov.go.id/produk\\_hukum/kepgub/sk\\_590-14\\_th\\_2022.pdf](https://jdih.jatengprov.go.id/produk_hukum/kepgub/sk_590-14_th_2022.pdf) pada 07 Maret 2025.

KPBU Kemenkeu, “Perkembangan Proyek Jalan Tol Yogyakarta Bawen”, KPBU Kemenkeu. Diakses dari [KPBU - Perkembangan Proyek Jalan Tol Yogyakarta - Bawen](#) pada 24 Oktober 2024.

Akhmad Nursalim, *S.AP.,M.AP.*, *Wawancara*, Kepala Satgas Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogya-Bawen, di Kabupaten Semarang, tanggal 29 November 2024.

Aji Mintoarjo, *S.H.*, *Wawancara*, Kepala Subbagian Sengketa Tanah Kantor Pertanahan Kab. Semarang, di Kabupaten Semarang, tanggal 13 Februari 2025.

Agus Wibowo,*S.E.*, *Wawancara*, Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kelurahan Bawen , di Kab. Semarang, tanggal 24 Februari 2025.

Dr. Supriyadi, *S.H., M.Kn.* *Wawancara*, Dosen Hukum Universitas Semarang, di Semarang, tanggal 12 Maret 2025.

Nurul Fatimatus,*S.H., M.H.*, *Wawancara*, Dosen Hukum Universitas PGRI Semarang, di Semarang, tanggal 16 Maret 2025.

Karsono, *Wawancara*, Pihak yang berhak atas ganti rugi pengadaan tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, di Kab. Semarang, tanggal 24 Februari 2025.

Ali Maksum, *Wawancara*, Pihak yang berhak atas ganti rugi pengadaan tanah Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, di Kab. Semarang, tanggal 24 Februari 2025.

Sofiyan, *Wawancara*, Masyarakat terdampak pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, di Kab. Semarang, tanggal 24 Februari 2025.

Inayah, *Wawancara*, Masyarakat terdampak pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, di Kab. Semarang, tanggal 24 Februari 2025.

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok

## Agraria

Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2020 Tentang Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.